

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Transportasi berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya dalam menjamin kelancaran mobilitas antarwilayah. Moda transportasi darat, terutama angkutan umum, menjadi sarana utama dalam menyediakan layanan pergerakan yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat luas (Yendi Naibaho et al., 2023). Angkutan aglomerasi mengintegrasikan kota inti dengan kawasan penyangga seperti daerah permukiman, kawasan industri, pusat pendidikan, dan pusat perdagangan. Melalui penyediaan angkutan aglomerasi yang terencana dan terjadwal, mobilitas masyarakat dapat dilayani secara lebih efisien, merata, dan berkelanjutan (Cikusin, 2023).

Dalam konteks pengembangan sistem transportasi perkotaan dan aglomerasi, angkutan massal berbasis jalan menjadi salah satu solusi strategis yang terus dikembangkan. Bus Rapid Transit (BRT) dirancang sebagai moda angkutan umum dengan kapasitas besar yang didukung oleh sistem operasional terjadwal, rute tetap, serta fasilitas pelayanan yang lebih terstandar (Rahman et al., 2023). Konsep BRT bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, menekan waktu tunggu penumpang, serta memberikan kemudahan akses dan keterjangkauan biaya bagi masyarakat. Kasiani & Widiyarta, 2023 menyatakan bahwa kualitas layanan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum secara berkelanjutan.

Sebagai salah satu moda angkutan umum yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah, BRT Trans Jateng diharapkan mampu memberikan layanan yang optimal, andal, dan terorganisir dengan baik. Penyelenggaraan layanan Trans Jateng mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur pemenuhan aspek pelayanan yang meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan sebagai tolok ukur mutu layanan

BRT Trans Jateng (PERATURAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 067/001/2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENGELOLA BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG, 2018).

Pengoperasian BRT Trans Jateng merupakan bentuk nyata tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyediakan angkutan umum berbasis jalan yang aman, nyaman, tertib, dan terjangkau (Peraturan Gubernur No.100.3.3.1/124 Tahun 2025 tentang TARIF ANGKUTAN AGLOMERASI PERKOTAAN TRANS JATENG, 2025). Melalui pengembangan angkutan aglomerasi Trans Jateng, pemerintah berupaya menghubungkan kota inti dengan wilayah pendukung melalui koridor-koridor utama dalam kawasan pengembangan perkotaan. Upaya ini diharapkan mampu memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang andal serta mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum.

BRT Trans Jateng Koridor I Semarang-Bawen merupakan salah satu koridor strategis yang melayani pergerakan masyarakat dari pusat Kota Semarang menuju wilayah penyangga di Kabupaten Semarang. Koridor ini telah beroperasi sejak tahun 2017 dan menunjukkan dinamika penggunaan layanan yang cukup signifikan. Pada tahun operasional pertamanya jumlah armada sebanyak 18 unit bus dengan capaian *load factor* 93,43%, tingkat penggunaan tahunan BRT cukup beragam, dimana *load factor* menjadi 87,14% pada tahun 2025. Koridor ini memiliki rute yang mencakup Stasiun Tawang, Tourist Information Center (TIC) Pemuda, dan Terminal Bawen dengan total panjang rute mencapai 45 km dalam satu arah dan 34 km dalam arah sebaliknya. Dengan jumlah armada sebanyak 28 bus dengan 2 bus cadangan dan ritase sebanyak enam kali perjalanan per hari, koridor ini memiliki 71 titik pemberhentian yang tersebar di sepanjang jalur layanan (Balai Transportasi Jawa Tengah, 2026).

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan mobilitas operasional, kinerja layanan BRT Trans Jateng Koridor I perlu dievaluasi secara berkala. Evaluasi tidak hanya diperlukan untuk menilai kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal, tetapi juga untuk mengidentifikasi efisiensi operasional yang ditinjau

dari indikator seperti load factor, headway, waktu tempuh, dan waktu tunggu (Novita Sari, 2020). Kinerja operasional yang tidak optimal berpotensi memengaruhi kenyamanan, keandalan layanan, serta tingkat kepuasan pengguna, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan. Regulasi tersebut menegaskan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin tersedianya angkutan umum antarkota dalam provinsi serta angkutan massal berbasis jalan di kawasan perkotaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, untuk memastikan bahwa layanan Trans Jateng Koridor Semarang-Bawen telah memenuhi standar pelayanan yang optimal, diperlukan evaluasi terhadap kinerja layanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Evaluasi ini mencakup efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal untuk Pengelola BRT Trans Jateng sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah No. 67 Tahun 2018. Melalui evaluasi kinerja pelayanan dan operasional Trans Jateng menjadi penting untuk memastikan bahwa layanan angkutan aglomerasi yang diselenggarakan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor I Semarang-Bawen. Evaluasi ini akan menjadi dasar pemenuhan kebutuhan mobilitas masyarakat, mendukung kebijakan transportasi berkelanjutan, serta memperkuat peran angkutan umum sebagai pilihan utama perjalanan di wilayah aglomerasi Jawa Tengah.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, fokus rumusan masalah dari penelitian ini:

1. Bagaimana tingkat pemenuhan kinerja pelayanan BRT Trans Jateng Koridor I berdasarkan SPM No. 67 Tahun 2018?
2. Bagaimana kinerja operasional BRT Trans Jateng Koridor I berdasarkan SK Dirjen Nomor 687 Tahun 2002?

3. Bagaimana rekomendasi yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan BRT Trans Jateng Koridor I Semarang - Bawen?

I.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas evaluasi layanan di Koridor I Semarang – Bawen, tanpa membahas koridor aglomerasi kedungsepur lainnya.
2. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi kinerja pelayanan dan operasional ditinjau dari (*load factor, headway, waktu tempuh, dan waktu tunggu*) Bus Trans Jateng Koridor I.
3. Evaluasi kinerja pelayanan mengacu pada Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah No. 67 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pengelola Bus Rapid Transit Trans Jateng.

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor I berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah No. 67 Tahun 2018.
2. Mengevaluasi kinerja operasional berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.687/A.J.206/DRJD/2002.
3. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan BRT Trans Jateng Koridor I Semarang - Bawen.

I.5. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Balai Transportasi Jawa Tengah
Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan sebagai dasar perbaikan kinerja layanan dan pengambilan kebijakan teknis yang lebih tepat sasaran dalam pengelolaan operasional BRT Trans Jateng, khususnya Koridor I Semarang–Bawen.
2. PT. Mulia Orda Serasi MOS
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi operator BRT Trans Jateng dalam meningkatkan kualitas layanan.

3. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan konteks wilayah lainnya.

4. Kampus Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

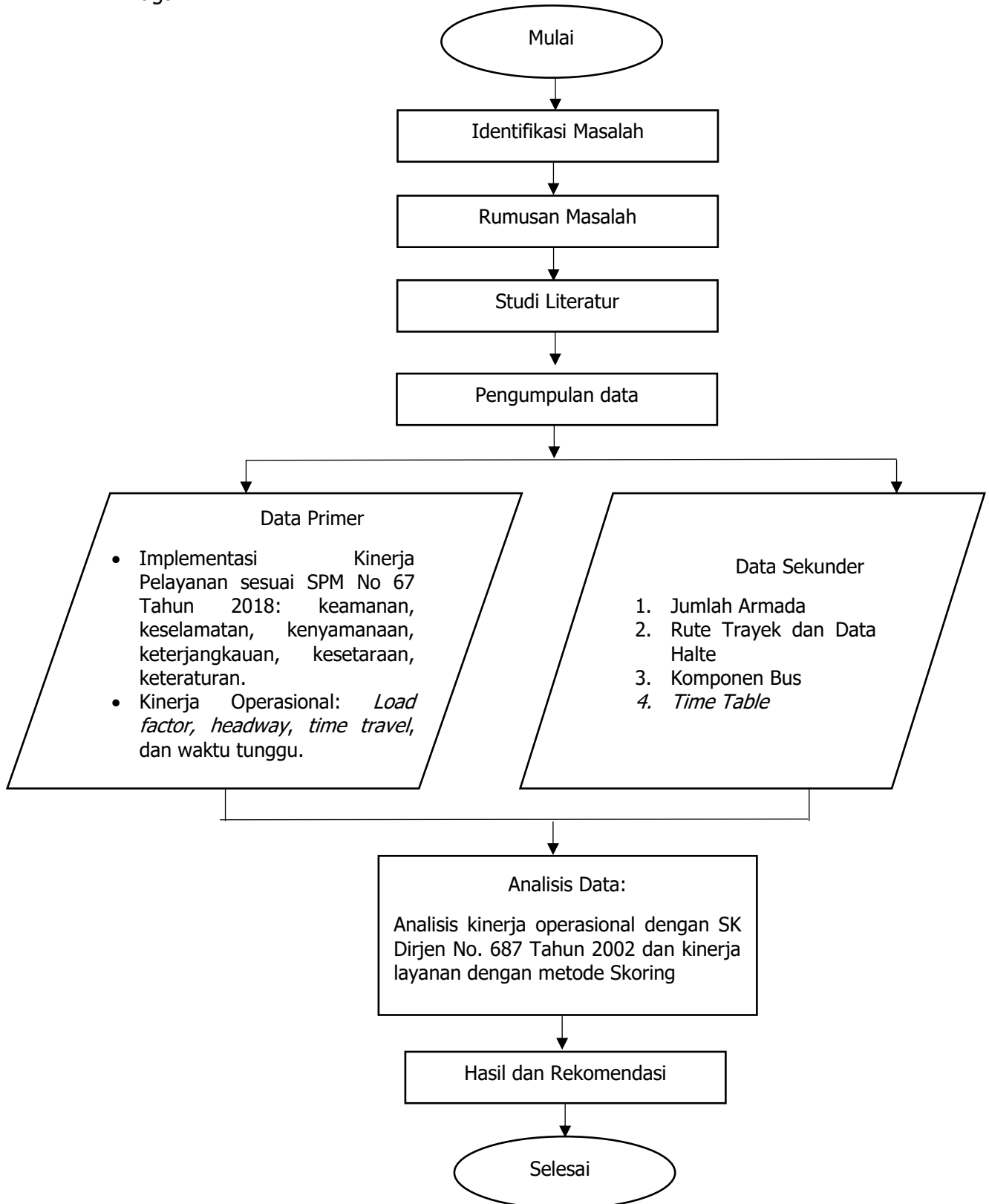
Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi akademik bagi mahasiswa dalam pengembangan kompetensi di bidang angkutan dan manajemen transportasi.

I.6. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang ini dimulai pada tanggal 1 September 2025 sampai dengan 28 Februari 2026 bertempat pada Balai Transportasi Jawa Tengah di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

I.7. Sistematika Penulisan

1. Bagan Alir



Gambar 1. 1 Diagram Alir

2. Prosedur Pengambilan Data

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan secara langsung dengan cara melihat, mencermati, serta mengukur berbagai aspek yang berkaitan dengan variabel penelitian terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang akurat dan factual (Rejeki et al., 2021). Dalam penelitian ini, observasi dilaksanakan melalui survei lapangan untuk menilai kondisi kinerja pelayanan bus dan fasilitas halte pada Bus Trans Jateng Koridor I.

Pengamatan difokuskan pada indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah No 67 Tahun 2018 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) untuk PENGELOLA BUS RAPID TRANSIT TRANS JATENG, serta ketentuan dalam SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor 687 Tahun 2002. Selain observasi lapangan, penelitian ini juga diperoleh melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan informasi pendukung dari instansi terkait untuk memperkuat hasil observasi.

3. Teknik Analisis Data

Penilaian kinerja pelayanan Bus Trans Jateng Koridor I dilakukan menggunakan metode skoring, yaitu dengan memberikan nilai pada setiap parameter variabel kinerja pelayanan berdasarkan indikator dalam Peraturan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2018. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual pelayanan di lapangan terhadap standar yang telah ditetapkan dalam regulasi tersebut (Em Faiqsa David Nabila, Hanendyo Putro, 2025).

Penilaian kinerja operasional dilakukan dengan mengolah data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Perhitungan dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang tercantum dalam SK Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.687/AJ.206/DRJD/2002. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai indikator operasional seperti kecepatan perjalanan, load factor, serta waktu antara (headway) sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat efektivitas layanan. (Agus Budi Purwantoro, Untung Sirinanto, 2006)